

## BAB II

### UPAYA INDIA MENGIMPLEMENTASIKAN CEDAW DALAM MENANGANI KASUS *DOWRY DEATH*

India telah meratifikasi CEDAW selama puluhan tahun lamanya, namun beberapa praktik kebudayaannya dinilai melanggar prinsip-prinsip CEDAW. Praktik kebudayaan yang dinilai melanggar hak asasi perempuan salah satunya yaitu sistem *dowry*. Permintaan *dowry* yang tidak kunjung terpenuhi telah mengakibatkan munculnya kekerasan pada perempuan, bahkan dalam beberapa kasus menyebabkan kematian pada perempuan atau sering disebut dengan *dowry death*. Penulis dalam bab ini berpendapat bahwa India telah berupaya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip CEDAW melalui hukum nasionalnya meskipun jumlah kasus *dowry death* selalu tinggi setiap tahun.

Bab ini secara spesifik membahas mengenai perkembangan praktik *dowry* sehingga dapat mengakibatkan kasus *dowry death* dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh India sebagai bagian dari pengimplementasian prinsip-prinsip CEDAW melalui pembentukan hukum nasionalnya. Bagian pertama pada bab ini akan membahas mengenai asal-usul sistem *dowry* beserta perkembangannya sehingga didapat alasan mengapa kasus *dowry death* masih terjadi hingga sampai saat ini. Bagian kedua akan membahas mengenai proses peratifikasian CEDAW oleh India dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menerapkan prinsip-prinsip CEDAW tersebut melalui pembentukan hukum nasional. Bagian ketiga akan berisi mengenai perkembangan praktik *dowry* setelah adanya peratifikasian CEDAW dan disertai pula beberapa contoh kasus yang terjadi di India yang terkait dengan penerapan hukum nasional tersebut. Bagian terakhir berisikan kesimpulan yang didapat dari pembahasan pada bagian-bagian sebelumnya.

#### 2.1 Sejarah Sistem *Dowry* di India

Kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu permasalahan utama yang belum dapat diselesaikan oleh India. Kasus kekerasan terhadap perempuan yang masih tinggi dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya kasus kejahatan yang menimpa perempuan setiap tahunnya. Perlakuan kekerasan yang paling sering

menimpa perempuan biasanya dilakukan oleh pihak pengantin laki-laki yang terdiri dari suami, keluarga maupun kerabat (Khanam, 2016). Kasus kekerasan dalam rumah tangga ini berkaitan dengan praktik *dowry* yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat India. Praktik *dowry* terus berlangsung seiring dengan keyakinan masyarakat India terhadap pernikahan. Pernikahan menjadi suatu hal yang dianggap suci di dalam tatanan sosial masyarakat India. Pernikahan bahkan menjadi tujuan hidup paling utama yang harus dicapai khususnya bagi seorang perempuan. Masyarakat India percaya bahwa seorang perempuan hanya akan bahagia apabila sudah melakukan pernikahan (Shankar, 1992). Namun, pernikahan bagi masyarakat India tidaklah mudah karena pihak keluarga pengantin perempuan yaitu pengantin perempuan itu sendiri dan keluarganya diharuskan untuk membayar sejumlah *dowry* sesuai dengan permintaan pihak pengantin laki-laki. Hal ini menjadi salah satu penyebab munculnya kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi setiap harinya di India.

Asal-usul mengenai konsep *dowry* tidak diketahui secara pasti. Praktik *dowry* di India diperkirakan telah berlangsung sejak abad ke-13 atau 14 Masehi. Pengantin laki-laki di India bagian utara akan mengenakan pakaian serba putih dengan membawa pedang untuk datang melamar pengantin perempuan. Pengantin laki-laki bersama rombongannya menunggang kuda betina putih menuju kediaman pengantin perempuan yang disertai dengan suara-suara tembakan senjata sepanjang perjalanan. Pengantin laki-laki bersama rombongannya yang telah sampai akan disambut dengan penuh rasa hormat seperti dijamu banyak makanan dan diberi beberapa hadiah. Pengantin laki-laki yang berhasil membawa pulang pengantin perempuannya diibaratkan seperti seorang pahlawan yang memenangkan sebuah peperangan atau istilah ini disebut dengan *woman as a price* (Beri, 1988).

Upacara penerimaan pengantin perempuan ke pihak pengantin laki-laki kemudian menjadi sebuah keharusan (Diwan, 1996). Pemberian *dowry* seiring dengan berkembangnya waktu menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian adat pernikahan Hindu. Semua kelas sosial dan agama dalam tatanan masyarakat India menganggap bahwa upacara pernikahan sangatlah penting

untuk menciptakan tali persaudaraan begitu pula dengan pemberian *dowry*. Pemberian *dowry* dari pihak pengantin perempuan ke pihak pengantin laki-laki awalnya dilakukan oleh masyarakat kasta tinggi yaitu Brahmana, terutama yang berada di India bagian utara dan barat laut (Dalmia & Lawrence, 2005). *Dowry* menurut Naskah India Kuno mengarah kepada *yautraka* yang berarti hadiah semacam kain untuk menandakan bahwa dua individu telah menyatu dalam suatu ikatan perkawinan. *Dowry* dijadikan sebagai simbol penerimaan pengantin perempuan karena telah menjadi pendatang baru di keluarga suaminya. Pengantin perempuan biasanya hanya membawa *dowry* berupa pakaian pengantin, perhiasan dan uang tunai (Hooja, 1969). *Dowry* dengan kata lain digunakan sebagai *financial security* atau simpanan bagi pengantin perempuan apabila terdapat kebutuhan mendadak yang diperlukannya atau anak-anaknya kelak (Rastogi & Therly, 2006). Selain itu, *dowry* juga diberikan sebagai bentuk penghormatan kepada pihak pengantin laki-laki. Pemberian *dowry* tidak boleh melalui paksaan dari pihak manapun.

Konsep *dowry* terus berkembang seiring dengan datangnya bangsa asing di tanah India. Bangsa asing yang paling memengaruhi perkembangan sistem *dowry* di India adalah Inggris yang datang pada awal abad ke-16. India mengalami berbagai macam perubahan terutama dalam bidang sosial dan ekonomi yang berdampak pada perkembangan sistem *dowry* selama masa kolonial Inggris tersebut. Kapitalisme yang diperkenalkan oleh kolonial Inggris telah memberikan “jalan” baru bagi India untuk menciptakan berbagai mobilitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam sistem *dowry* yang kemudian mengalami perubahan besar-besaran pada masa ini (Sheel, 1997).

Sistem kuno *dowry* India dengan sistem Kolonial Inggris mengalami benturan budaya sehingga mendorong perubahan besar-besaran dalam sistem *dowry*. Sesuai dalam Naskah India Kuno, hal yang paling terlihat dalam perubahan sistem *dowry* di India yaitu kasta. Pengantin perempuan dahulu hanya akan dinikahkan dengan pengantin laki-laki yang memiliki kasta setara dengannya. Akibat dari adanya perubahan sistem kasta oleh Inggris, maka masyarakat India diperbolehkan untuk melakukan pernikahan antar kasta. Hal

ini dimanfaatkan oleh banyak pihak terutama yang berasal dari golongan kasta rendah (Oldenburg, 2002). Perbedaan kasta tersebut menyebabkan pihak yang berasal dari golongan kasta lebih rendah kesulitan dalam memenuhi permintaan *dowry*.

Kolonial Inggris telah menyebabkan perubahan secara besar-besaran terhadap kehidupan masyarakat India, termasuk juga pada hak perempuan (Tambiah & Goody, 1973). Kolonial Inggris bermaksud melakukan perubahan agar kehidupan masyarakat India menjadi lebih teratur. Masyarakat India dalam pelaksanaannya cenderung salah menginterpretasikan peraturan tersebut. Hal ini justru memunculkan superioritas laki-laki terhadap perempuan, salah satunya yaitu ketika Lord Cornwallis berkuasa di tahun 1793 (Oldenburg, 2002). Cornwallis memberlakukan kebijakan sistem zamindari pada masa pemerintahannya. Sistem kepemilikan properti ini merupakan sebuah konsep yang baru di India, baik itu dalam sistem pemerintahan maupun sosialnya.

Para perempuan dilarang atas kepemilikan segala jenis properti pada masa zamindari. Masyarakat India terutama orang tua dari pengantin perempuan memiliki kebiasaan tradisional untuk memberikan sejumlah uang atau kekayaan lainnya kepada anak perempuannya sebagai bekal kehidupan pernikahan. Pemberlakuan sistem zamindari ini sangat kontras dengan tradisi masyarakat India kuno. Orang tua pengantin perempuan yang ingin memberi tanah atau properti kepada putrinya terpaksa memberikannya melalui pihak pengantin laki-laki. Perubahan ini telah menyebabkan pihak pengantin laki-laki dapat dengan mudah menguasai *dowry* yang diberikan oleh orang tua pengantin perempuan (Mohamad, 2013).

Kepemilikan *dowry* bukan lagi menjadi milik pengantin perempuan, melainkan menjadi milik pihak pengantin laki-laki. *Dowry* kemudian dianggap sebagai hak bagi pengantin laki-laki ketika akan menikah dengan pengantin perempuan. Praktik *dowry* juga mulai dilakukan oleh masyarakat non-Hindu dan dalit<sup>2</sup> (Lakshmi, 1989). Pihak pengantin perempuan diharuskan untuk memberikan sejumlah *dowry* sesuai dengan permintaan pihak pengantin laki-

---

<sup>2</sup> Dalit merupakan kelompok masyarakat yang tidak memiliki kasta sehingga mereka hidup dalam kemiskinan karena sulit untuk mengakses pendidikan dan pekerjaan

laki ketika melangsungkan pernikahan. Pelunasan dan permintaan *dowry* terus berlanjut hingga setelah pernikahan berlangsung (Mandal, 2000). Perempuan terkadang dipaksa oleh keluarganya untuk menikah dengan laki-laki yang kastanya lebih tinggi atau yang disebut hipergami. Hal ini memungkinkan bagi kasta yang lebih rendah untuk menaikkan kelas sosialnya (Jagori, 2009).

Kasus kekerasan terhadap perempuan akibat *dowry* semakin diperburuk dengan peraturan Inggris yang mewajibkan sistem *dowry* yang baru untuk terus dijalankan. Kolonial Inggris mewajibkan sistem *dowry* sebagai cara resmi untuk melakukan pernikahan, sehingga semakin memberatkan posisi pengantin perempuan. Selain itu, peraturan mengenai pelarangan kepemilikan properti bagi perempuan telah menandakan bahwa segala jenis kekayaan perempuan tersebut akan menjadi milik pengantin laki-laki. Sistem *dowry* pada masa kolonial justru semakin menunjukkan sikap diskriminasi terhadap perempuan di India karena bersifat merendahkan, menekan perempuan dan menjunjung superioritas laki-laki (Pulitzer Center, 2013).

Pemberlakuan sistem *dowry* yang baru telah memunculkan permasalahan lain yang juga berkaitan dengan hak perempuan di India. Hal ini disebabkan oleh terjadinya pergeseran pandangan dalam masyarakat India terhadap praktik kebudayaannya. Peraturan dalam pembatasan kepemilikan properti telah menunjukkan sikap diskriminasi terhadap perempuan. Terbatasnya cara perempuan India dalam mendapatkan kepemilikan properti justru berakibat fatal kepada perekonomian perempuan India. Apabila perempuan India tidak mampu dalam memenuhi kebutuhannya akibat dari adanya peraturan diskriminasi seperti pembatasan kepemilikan properti, maka mereka tidak mampu untuk membayar sejumlah *dowry* yang diminta oleh pihak pengantin laki-laki. Beban *dowry* kemudian akan dilimpahkan kepada keluarganya (Lucy, 1978).

Semenjak adanya perubahan sistem *dowry* dilaporkan telah terjadi peningkatan pembayaran *dowry* hingga berkali lipat di India. Pelunasan *dowry* yang tidak kunjung usai telah mengakibatkan pihak pengantin perempuan mengalami tekanan keuangan sehingga mendorong terjadinya penindasan dan kekejaman, baik itu secara fisik maupun mental (Reshma & Ramegowda,

2013). Pihak pengantin perempuan tidak lagi mampu dalam memenuhi jumlah *dowry* yang diminta, maka pihak pengantin laki-laki akan memberikan ancaman atau melakukan kekerasan serta penyiksaan terhadap pengantin perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga yang berulang kali terjadi dapat menimbulkan masalah yang lebih serius seperti pembunuhan, bunuh diri, cedera fisik parah, hingga penyiksaan secara mental. Tuntutan dari *dowry* itu sendiri secara tidak langsung telah memengaruhi kehidupan perempuan tersebut, baik itu secara sosial, ekonomi maupun budaya.

Kekerasan terhadap perempuan akibat adanya sistem *dowry* telah memunculkan sebuah istilah yaitu *dowry death*. Istilah ini merujuk karena terdapat banyak sekali kasus pengantin perempuan yang dibunuh oleh suaminya atau kerabat atau keluarga suaminya dengan berbagai macam cara. Pengantin perempuan yang belum melunasi *dowry* dapat dibunuh dengan cara dibakar. Pembunuhan dengan cara dibakar ini merupakan cara yang paling umum dan sering kali pihak aparat sulit untuk mengidentifikasi apakah mayat tersebut tewas akibat kecelakaan dapur, bunuh diri atau pembunuhan (Mandal, 2000). Hal ini dikarenakan kecelakaan yang menimpa perempuan di dapur sangatlah lazim di India. Perempuan di India dilaporkan sebanyak 70% tewas akibat kebakaran atau kecelakaan yang terjadi di dapur (Faizal & Rajagopalan, 2005). Para perempuan India dalam kehidupan sehari-hari masih menggunakan pakaian adat mereka yaitu sari yang mudah sekali tersulut oleh api. Cara umum kedua yang sering dilakukan yaitu dengan menenggelamkan pengantin perempuan ke dalam sumur. Selanjutnya, meracuni dengan insektisida, menyiramkan asam ke wajah dan leher pengantin perempuan. Pelaku *dowry death* menyamakan tindak pembunuhannya tersebut sebagai tindakan bunuh diri (Oktaviani & Setiawati, 2018). Setelah mengalami kondisi yang sedemikian rupa, akhirnya pada pertengahan tahun 1980-an terjadi protes besar-besaran untuk menentang sistem *dowry*. Para perempuan India bersama dengan LSM melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menentang subordinasi perempuan di tingkat keluarga (Tripathy & Arora, 2008).

## 2.2 Implementasi CEDAW oleh India

*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* atau CEDAW merupakan sebuah konvensi internasional utama yang menjunjung tinggi hak asasi perempuan untuk bebas dari perlakuan diskriminasi. Mukadimah dari CEDAW menyatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan telah melanggar prinsip kesetaraan dalam menghormati perempuan sebagai manusia yang bermartabat. Perilaku diskriminasi terhadap perempuan telah mendorong terjadinya kasus kekerasan, terutama di dalam rumah tangga (Subhan, 2004). Konvensi ini mengharuskan negara-negara peserta melalui aparaturnya dan aktor non-negara untuk mengambil langkah tegas dalam memberantas perlakuan diskriminasi terhadap perempuan di bidang sosial, budaya, sipil, ekonomi maupun politik (IWRAW Asia Pacific, 2005). Negara-negara peserta wajib untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip CEDAW tersebut ke dalam hukum nasionalnya. Negara peserta diharuskan untuk menyerahkan *initial report* yang panjangnya tidak boleh melebihi 100 halaman dalam rentang waktu kurang dari setahun setelah resmi meratifikasi. *CEDAW Committee* akan meninjau perkembangan negara-negara peserta dalam upaya pengimplementasian melalui laporan periodik yang dilakukan setiap empat tahun sekali dengan panjang tidak lebih dari 70 halaman (IJRC, 2019).

### 2.2.1 Proses peratifikasian CEDAW oleh India

India menandatangani CEDAW pada 30 Juli 1980 yang kemudian baru diratifikasi pada 9 Juli 1993 (CEDAW, 2012). Peratifikasian CEDAW diharapkan mampu untuk memberikan perubahan yang lebih baik terkait dengan penerapan hak asasi perempuan di India. India melakukan satu reservasi dan dua deklarasi dalam proses peratifikasian (Mehra, 2013). India menegaskan reservasi tersebut melalui pernyataannya:

*“With regards to article 29 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Government of the Republic of India declares that it does not consider itself bound by paragraph 1 of this article”* (IWRAW Asia Pacific, 2005).

Pasal 29 ayat 1 yang tertulis di dalam CEDAW adapun berisikan mengenai apabila kemungkinan terjadi perselisihan terkait interpretasi yang berbunyi:

*“Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of the present Convention which is not settled by negotiation shall, at the request of one of them, be submitted to arbitration. If within six months from the date of the request for arbitration the parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in conformity with the Statute of the Court”* (UN Women, 2014).

Pasal ini menyebutkan apabila terjadi perselisihan yang melibatkan dua negara peserta atau lebih mengenai interpretasi CEDAW, maka salah satu dari pihak yang terlibat tersebut berhak untuk mengajukan arbitrase jika mana penyelesaian tidak dapat dicapai dengan cara negosiasi. Apabila para pihak masih enggan untuk menyetujui arbitrase tersebut dalam rentang waktu enam bulan, maka salah satu pihak yang terlibat dapat membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional sesuai dengan prosedur Statuta Mahkamah Internasional (IWRAP Asia Pacific, 2005). Hal ini berarti India tidak mengakui mekanisme arbitrase oleh pihak lain apabila terjadi sebuah perselisihan, sekaligus menolak yurisdiksi Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan perselisihan antara India dengan pihak lain yang berkaitan dengan interpretasi atau penerapan prinsip-prinsip CEDAW.

Selain itu, India juga melakukan dua kali deklarasi. Deklarasi pertama India menyinggung pasal 5a dan pasal 16 ayat 1 melalui pernyataannya:

*“With regard to articles 5(a) and 16(1) of the Convention on the Elimination of All Discrimination against Women, the Government of the Republic of India declares that it shall abide by and ensure these provisions in conformity with its policy of non-interference in the personal affairs of any Community without its initiative and consent”* (IWRAP Asia Pacific, 2005).

Pasal 5a yang tertulis di dalam CEDAW berisikan mengenai superioritas terhadap salah satu gender dalam bidang sosial dan budaya:



*“To modify the social and cultural patterns of conduct of men and women, with a view to achieving the elimination of prejudices and customary and all other practices which are based on the idea of the inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped roles for men and women” (UN Women, 2014).*

Pasal ini menegaskan bahwa negara peserta melalui kebijakan perundangannya diharapkan mampu untuk mengubah pola kebiasaan budaya dan tingkah laku sosial masyarakat yang didasarkan pada sikap yang menginferioritaskan atau mensuperioritaskan pada salah satu gender, atau peranan stereotipe laki-laki dan perempuan sehingga dapat tercipta penerapan prinsip-prinsip CEDAW di dalam kehidupan bermasyarakat.

Sementara itu, pasal 16 ayat 1 yang tertulis di dalam CEDAW berisikan mengenai peran negara terhadap hak perempuan dalam rumah tangga yang berbunyi:

*“States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a basis of equality of men and women...” (UN Women, 2014).*

Pasal 16 ayat 1 mewajibkan negara-negara peserta dalam menjamin warga negara perempuannya untuk memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Diharapkan agar para perempuan dapat memutuskan suatu hal secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah anak yang akan dimiliki, jarak kelahiran antar anak, memperoleh informasi, mengenyam pendidikan dan akses untuk mewujudkan hal-hal tersebut. Di dalam pasal ini pula, tercantum berbagai hak mengenai status persamaan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan rumah tangga yang dimaksud, antara lain:

*“...(a) The same right to enter into marriage; (b) The same right freely to choose a spouse and to enter into marriage only with their free and full consent; (c) The same rights and responsibilities during marriage and at its dissolution; (d) The same rights and responsibilities as parents, irrespective of their marital status, in matters relating to their children; in all cases the interests of the children shall be paramount; (e) The same rights to decide freely and responsibly on the number and spacing of their children and to have access to the information, education and means to enable them to exercise these rights; (f) The same rights and responsibilities with regard to guardianship, wardship, trusteeship and*

*adoption of children, or similar institutions where these concepts exist in national legislation; in all cases the interests of the children shall be paramount; (g) The same personal rights as husband and wife, including the right to choose a family name, a profession and an occupation; (h) The same rights for both spouses in respect of the ownership, acquisition, management, administration, enjoyment and disposition of property, whether free of charge or for a valuable consideration” (UN Women, 2014).*

India melalui deklarasi pertama ini mengisyaratkan untuk tidak serta merta dalam menerima bentuk-bentuk kewajiban negara peserta CEDAW dan juga tidak serta merta dalam menerima kewajiban sebagai upaya untuk memperkenalkan hak atau prinsip-prinsip CEDAW. Kewajiban-kewajiban tersebut akan ditinjau ulang dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *The Constitution of India*. India akan tetap berusaha untuk mengimplementasikan pasal 5a dan 16 ayat 1 ke dalam hukum nasionalnya. Namun tidak akan melakukan intervensi terhadap masalah internal suatu kelompok masyarakat manapun di India, kecuali diberi wewenang oleh kelompok terkait.

Selanjutnya, India melakukan deklarasi keduanya yang menyinggung pasal 16 ayat 2 melalui pernyataannya:

*“With regard to Article 16(2) of the CEDAW, the Government of the Republic of India declares that though in principle it fully supports the principle of compulsory registration of marriages, it is not practical in a vast country like India with its variety of customs, religions and level of literacy” (IWRAW Asia Pacific, 2005).*

Pasal 16 ayat 2 yang tertuang di dalam CEDAW berisikan larangan untuk melakukan pernikahan dini:

*“The betrothal and the marriage of a child shall have no legal effect, and all necessary action, including legislation, shall be taken to specify a minimum age for marriage and to make the registration of marriages in an official registry compulsory” (UN Women, 2014).*

Pasal ini melarang terjadinya segala bentuk pernikahan dini pada anak-anak, baik itu laki-laki maupun perempuan. CEDAW melalui pasal ini mendorong para negara pesertanya untuk menentukan usia minimum bagi warga negaranya dalam melakukan pernikahan maupun pertunangan. Setiap pernikahan wajib untuk didaftarkan secara hukum. Hal ini akan

memudahkan pihak berwajib untuk menangani apabila terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga. Namun, keseluruhan deklarasi yang dilakukan oleh India dianggap mengurangi inti kewajibannya sebagai negara peserta CEDAW.

### **2.2.2 Pengimplementasian CEDAW oleh India dalam Kebijakannya**

Peranan *personal law* sangat besar pengaruhnya di India. Hukum ini bersumber dari multikulturalisme yang berkembang di India, yang mana hukum ini banyak mengandung aturan-aturan yang bersumber dari agama seperti Hindu, Islam, Kristen dan Parsi maupun dari kelompok masyarakat yang ada. Meskipun *personal law* yang dimiliki oleh masyarakat Hindu sudah tidak lagi mencantumkan perbedaan kasta, tetapi hal tersebut tumpang tindih dengan kebiasaan tradisional yang sudah mengakar kuat di India. Hal ini juga berlaku terhadap *personal law* yang dimiliki oleh kelompok masyarakat lain (Subramanian, 2014, pp. 137-139). *Personal law* yang berkembang di India dianggap masih memiliki nilai-nilai yang diskriminatif terhadap perempuan seperti kepemilikan atas suatu properti. India setelah meratifikasi CEDAW terus berusaha untuk memberantas diskriminasi terhadap perempuan dengan melakukan amandemen pada *personal law* agar dapat mengurangi angka kekerasan.

India akhirnya melakukan amandemen terhadap *Hindu Succession Act (1956)* pada 5 September 2005 melalui persetujuan Presiden Abdul Kalam. *Personal law* tersebut kemudian berganti nama menjadi *Hindu Succession Amendment Act (2005)* dan mulai berjalan efektif pada 9 September 2005. *Hindu Succession Amendment Act (2005)* melakukan perubahan pada *section 6*. Amandemen pada *section 6* ini bertujuan untuk mengubah perlakuan diskriminatif terhadap perempuan dalam hal kepemilikan properti (Kharat, 2017). *Section 6* menyebutkan bahwa anak perempuan memiliki hak yang sama dengan anak laki-laki dalam mewarisi harta warisan keluarga, anak perempuan dan anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga harta warisan tersebut serta anak perempuan dan anak laki-laki akan mendapat jumlah warisan yang sama.

Selain itu, anak laki-laki atau cucu laki-laki atau cicit laki-laki tidak lagi berkewajiban untuk melunasi tanggungan hutang yang dilakukan oleh ayahnya, kakeknya maupun buyutnya karena hutang seseorang yang telah meninggal akan dianggap lunas (Ministry of Law and Justice of India, 2005). *The Supreme Court of India* juga memutuskan bahwa kasus persengketaan atas kepemilikan properti yang terjadi sebelum tahun 2005 dapat diadili dengan *Hindu Succession Amendment Act (2005)*.

India kemudian membentuk peraturan perundangan yang membahas secara spesifik terkait dengan kekerasan terhadap perempuan yang diberi nama *Protection of Women from Domestic Violence Act (2005)* atau PWDVA 2005. Peraturan ini disetujui oleh *Parliament of India* pada 13 September 2005 dan baru berjalan secara efektif pada 26 Oktober 2006. India melalui peraturan ini mulai memiliki definisi yang jelas dibanding dengan *section 498A* dalam *Indian Penal Code (1860)* terkait dengan *domestic violence* atau kekerasan dalam rumah tangga (International Justice Resource Center, 2019). PWDVA 2005 memiliki cakupan yang luas terhadap apa yang masuk ke dalam kriteria *domestic violence* terhadap perempuan selain kekerasan fisik. *Domestic violence* menurut PWDVA 2005 meliputi kekerasan verbal, seksual hingga ekonomi. Peraturan ini bersifat preventif yang dibentuk sebagai upaya India dalam melindungi perempuan.

Menurut *section 3* yang terdapat di dalam PWDVA 2005, *domestic violence* dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan, baik itu tidak disengaja maupun dipaksa oleh pihak lain, apabila:

1. dinilai mengancam atau melukai atau membahayakan pengantin perempuan maupun pihak yang terkait dengannya dari segi kesehatan (*health*), keselamatan (*safety*), kehidupan (*life*), anggota tubuh (*limb*), kenyamanan (*well-being*), baik yang dilakukan secara fisik maupun mental sehingga mengakibatkan kekerasan fisik, verbal, seksual dan ekonomi

2. dinilai mengancam atau melecehkan atau melukai atau membahayakan pengantin perempuan atau pihak yang terkait dengannya demi memenuhi permintaan *dowry* (State Legal Services Authority, 2005)

Berdasarkan definisi tersebut, India secara eksplisit merincikan kategori *domestic violence* bagi perempuan. PWDVA 2005 memiliki tujuan utama yaitu melindungi pengantin perempuan dari adanya tindakan *domestic violence* yang berasal dari pihak pengantin laki-laki (Ministry of Law and Justice, 2005). *Domestic violence* dalam PWDVA 2005 menyebut *dowry* sebagai permasalahan utama dalam kekerasan terhadap perempuan di India. Dengan demikian, PWDVA 2005 diharapkan dapat menjadi instrumen untuk membantu India dalam mengatasi *dowry death*. CEDAW Committee sendiri mengatakan bahwa pembentukan PWDVA 2005 merupakan langkah yang tepat bagi India dalam memperjuangkan dan menjamin hak para perempuan di negaranya (CEDAW, 2007).

India membentuk *The Ministry of Women and Child Development* yang dulunya merupakan bagian dari *The Ministry of Human Resources Development* pada 30 Januari 2006. Tujuan utama dari *The Ministry of Women and Child Development* adalah memberdayakan para perempuan di India agar terbebas dari perlakuan diskriminatif, menyadarkan para perempuan akan hak-hak yang dimilikinya dan memberdayakan perempuan secara sosial dan ekonomi (Ministry of Women and Child Development, 2017). *The Ministry of Women and Child Development* memiliki program yang mendukung tujuan utamanya, yang mana salah satunya yaitu *Swadhar Greh Scheme*. Perempuan yang datang ke *Swadhar Greheither*, baik itu sendiri atau bersama dengan pihak lain maka akan diwawancarai terlebih dahulu oleh konselor sesuai dengan protokol dari *The Ministry of Women and Child Development*. Wawancara ini bertujuan untuk menentukan jenis layanan apa yang akan diberikan terhadap pelapor sehingga dapat mengurangi trauma yang dimilikinya. Pelapor apabila ternyata menderita trauma yang tidak bisa diatasi oleh layanan yang terdapat di *Swadhar Greh Scheme*, maka akan dirujuk ke LSM lainnya

yang dinilai mampu. Hasil wawancara ini dibuat dalam bentuk dokumen yang nantinya akan diperiksa ulang oleh *The Ministry of Women and Child Development* bersama dengan kepolisian setempat. Pembiayaan *Swadhar Greh Scheme* sepenuhnya ditanggung oleh *The Ministry of Women and Child Development* bersama dengan masing-masing negara bagian (National Portal of India, 2011).

### **2.2.3 Perkembangan Kasus *Dowry Death* di India Setelah Meratifikasi CEDAW**

India yang telah meratifikasi CEDAW tetap tidak akan melakukan intervensi terhadap masalah internal atau pribadi dari suatu kelompok masyarakat manapun, kecuali diberi wewenang oleh kelompok tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan deklarasi pertamanya. Hampir keseluruhan masyarakat India tidak menginginkan adanya intervensi oleh pemerintah terkait dengan penyelesaian masalah-masalah pribadi. Pihak pengantin laki-laki bergantung pada *dowry* untuk meningkatkan status ekonominya karena lebih mudah dalam mengumpulkan kekayaan materi (Ravikant, 2000). *Dowry death* memungkinkan pengantin laki-laki untuk mencari pengantin perempuan yang baru dengan *dowry* yang lebih menguntungkan. Banyak dari pihak pengantin laki-laki cenderung memilih untuk abai terhadap suatu hukum yang terkait dengan *dowry death* karena memiliki kepentingan pribadi. Pihak pengantin perempuan yang memberikan sejumlah *dowry* berdasarkan paksaan, maka pihak pengantin perempuan tersebut telah dianggap menerima tindakan diskriminasi yang menimpa dirinya sendiri atau anak perempuannya. Peratifikasian CEDAW oleh India tidak terlalu memengaruhi praktik *dowry* karena masih terus berlangsung hingga sampai saat ini terutama di daerah pinggiran India

Meskipun demikian, India tetap mengupayakan melalui dilakukannya amandemen dan juga membuat peraturan perundangan yang baru sesuai dengan prinsip-prinsip CEDAW. Namun, jumlah kasus *dowry death* tetap berada dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Perempuan yang dilaporkan tewas akibat *dowry* dilaporkan sebanyak 21 korban setiap

harinya dengan tingkat hukuman hanya 34,7% (India Today, 2017). Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan *dowry death* dari tahun 2005 hingga 2015 dapat dilihat dalam bentuk tabel. Hal ini semakin menegaskan bahwa masih tingginya jumlah kasus *dowry death* dari keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan walaupun India telah meratifikasi CEDAW. Berdasarkan data dari *National Crime Records Bureau* atau *NCRB* (2015) dapat ditemukan data jumlah kasus *dowry death*. Berikut ini adalah data tabel tersebut:

**Tabel 1.**

<b>Tahun</b>	<b>Kekerasan Terhadap Perempuan</b>	<b><i>Dowry Death</i></b>
2005	58.319	6.787
2006	63.128	7.618
2007	75.930	8.093
2008	81.344	8.172
2009	89.546	8.383
2010	94.041	8.391
2011	99.135	8.618
2012	106.527	8.233
2013	118.866	8.033
2014	122.877	8.455
2015	133.403	7.634

Sumber: National Crime Records Bureau, 2015

Terdapat tiga kasus yang relevan dengan kekerasan dalam rumah tangga akibat *dowry* dan *dowry death* di India yang akan digunakan sebagai contoh kasus. Kasus yang menimpa Amina dan Pushpa dapat menjadi bukti bahwa masih ada tindakan kekerasan dalam rumah tangga akibat *dowry* di India menjadi contoh kasus pertama. Amina merupakan seorang tenaga kerja pendidik yang tinggal daerah pedesaan di Mumbai yang berada di negara bagian Maharashtra. Ia tinggal bersama dengan suami dan tiga anaknya. Suami Amina mulai menuntut sejumlah *dowry*

sesaat setelah ia kehilangan pekerjaannya pada tahun 2007. Amina yang tidak mampu untuk memenuhi permintaan tersebut kemudian mendapat kekerasan dalam rumah tangga, baik secara emosional, mental maupun fisik. Suami Amina yang merasa kesal karena permintaannya terkait dowry tidak terpenuhi akhirnya mengancam akan mengusir ia dan anak-anaknya pada tahun 2010 (Scroll.in, 2020).

Pushpa yang tinggal di Desa Kohasi yang berada di negara bagian Uttar Pradesh mendapat beberapa ancaman terkait dengan permintaan *dowry* yang tidak kunjung terpenuhi menjadi contoh kasus kedua. Ancaman tersebut dilakukan oleh mertua dan kerabat dari suaminya. Ketika pihak keluarga Pushpa menyatakan bahwa sudah tidak mampu lagi dalam memenuhi permintaan *dowry*, mertua dan kerabat dari suaminya secara sengaja melakukan kekerasan. Pushpa kemudian diusir paksa dari kediaman suaminya yang disertai dengan tindakan pemukulan, diludahi hingga ditarik rambutnya sampai ia berada di luar rumah pada tahun 2009 (Volunteers, 2019).

Kasus yang menimpa Shalu menjadi contoh kasus ketiga. Kematian Shalu diidentifikasi sebagai kasus *dowry death*. Shalu dinikahkan oleh Sonu yang mana mereka memiliki perbedaan kasta. Mayat Shalu ditemukan tewas di kediaman kerabat dari Sonu yang terletak di Distrik Shamli, Desa Nala. Pihak keluarga dari Shalu kemudian melaporkan kasus ini ke kepolisian Kandhla yang berada dekat dengan lokasi pembunuhan (The New Indian Express, 2020).

### **2.3 Kesimpulan**

Perkembangan praktik *dowry* dari waktu ke waktu menyebabkan nilai dari sistem *dowry* juga ikut mengalami perubahan. Perubahan terjadi besar-besaran ketika Kolonial Inggris datang ke India. Sistem *dowry* berubah hampir secara keseluruhan yaitu ketika tidak diakuinya hak-hak perempuan India dalam kepemilikan properti pada saat Lord Cornwallis berkuasa di tahun 1793. *Dowry* yang pada awalnya dijadikan sebagai *financial security* bagi pengantin perempuan telah berubah menjadi milik pihak pengantin laki-laki. Selain itu,



peraturan perundangan masa Kolonial Inggris kala itu mendorong masyarakat India untuk melakukan pernikahan yang berbeda kasta. Peraturan ini kemudian disalahgunakan oleh masyarakat untuk memperkaya diri. Sistem *dowry* yang semula hanya dilakukan oleh masyarakat Hindu berkasta Brahmana, kemudian diikuti oleh semua kelompok masyarakat sosial maupun agama di India. Bentuk pemberian *dowry* yang semula dapat dijangkau oleh semua kalangan telah berubah menjadi barang-barang berharga dan mewah.

Fenomena ini mendapat perhatian seluruh masyarakat India ketika sistem *dowry* ini menimbulkan kekerasan terhadap perempuan hingga menimbulkan kematian atau yang disebut *dowry death*. India berupaya untuk menangani kasus ini dengan melakukan amandemen terhadap *personal law* dan membentuk peraturan perundangan lainnya setelah meratifikasi CEDAW. India secara mengejutkan melakukan amandemen terhadap *Hindu Succession Act (2005)* dan membentuk PWDVA 2005 dengan didasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat di dalam CEDAW untuk mengurangi perilaku diskriminasi terhadap perempuan pada tahun 2005. India kemudian membentuk *The Ministry of Women and Child Development* untuk memberdayakan perempuan secara sosial dan ekonomi pada tahun 2006. Meskipun masyarakat India tetap melakukan praktik *dowry* dan langkah yang diambil oleh pemerintah masih sekadar preventif, namun India tetap berusaha untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip CEDAW ke dalam hukum nasionalnya.